



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
Telp. (0752)780633 • Fax. (0752)780633

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : 800/ 01 /PUPR-LK/I-2023

Tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- MENIMBANG :**
1. Dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota maka untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 2. untuk memenuhi maksud sebagaimana di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);